

The Role of the Village Government in Implementing the Family Hope Program (PKH) in Tinelo Village, Tilango District, Gorontalo Regency

Sasmitha Maharani Suharto^{1*}, Jusrin Kadir², I Kadek Satria Arsana³
Universitas Bina Taruna Gorontalo

Corresponding Author: Sasmitha Maharani Suharto
sasmitasuharto11@gmail.com

ARTICLE INFO

Keywords: Role,
Implementation, Program,
PKH

Received : 23, September
Revised : 25, October
Accepted: 27, November

©2023 Suharto, Kadir, Arsana: This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



ABSTRACT

The aim of this research is so that the government's role in actualizing the PKH (Family Hope Program) program in the villages of Tinelo, Tilango, Gorontalo can be known during its implementation. With a research focus, namely coordination, data validation, and data distribution. The type of research used to discuss and process information in this research is descriptive qualitative. Meanwhile, the method used to collect information is by observation, interviews, and also literature review. The technique used to analyze data is qualitative analysis according to the type of research. The results obtained from the conclusion are that the role of the village government in implementing the Family Hope Program (PKH) has not been effective. This can be seen from the aspect that coordination has not been effective, data validity has not been effective, and aid distribution has not been effective in Tinelo Village, Tilango District, Gorontalo Regency.

Peran Pemerintah Desa dalam Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Tinelo Kecamatan Tilango Kabupaten Gorontalo

Sasmitha Maharani Suharto^{1*}, Jusrin Kadir², I Kadek Satria Arsana³

Universitas Bina Taruna Gorontalo

Corresponding Author: Sasmitha Maharani Suharto

sasmitasuharto11@gmail.com

ARTICLE INFO

Kata Kunci: Peran,
Pelaksanaan, Program, PKH

Received : Tanggal, Bulan

Revised : Tanggal, Bulan

Accepted: Tanggal, Bulan

©2023 Suharto, Kadir, Arsana: This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah agar peran serta pemerintah dalam pengaktualisasian program PKH (Program Keluarga Harapan) di desa Tinelo, Tilango, Gorontalo dapat diketahui selama pelaksanaannya. Dengan fokus penelitian yaitu koordinasi, validasi data, dan penyaluran data. Jenis penelitian yang digunakan untuk membahas dan mengolah informasi dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Sedangkan metode yang digunakan untuk mengumpulkan informasi adalah dengan cara observasi, wawancara, dan juga kajian literatur. Teknik yang digunakan untuk menganalisa data yaitu analisis kualitatif sesuai dengan jenis penelitiannya. Hasil yang diperoleh dari kesimpulan adalah bahwa peran pemerintah desa dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) belum efektif dilakukan. hal ini terlihat dari aspek koordinasi belum efektif, validitas data belum efektif, dan penyaluran bantuan belum efektif dilakukan di Desa Tinelo Kecamatan Tilango Kabupaten Gorontalo.

PENDAHULUAN

Persoalan jaminan sosial tidak hanya menyangkut negara-negara berkembang dan terbelakang, namun juga negara-negara maju. Kemiskinan merupakan hambatan dalam mencapai kesejahteraan sosial serta merupakan permasalahan yang sangat kompleks, sehingga satu negara tidak dapat memiliki kapasitas yang cukup untuk memberantas kemiskinan sendirian. Permasalahan kemiskinan merupakan permasalahan yang kompleks karena berkaitan dengan aspek ekonomi, sosial dan budaya. Penguatan kesejahteraan rakyat tertuang dalam UU RI No. 11 Tahun 2009 mengenai Jaminan Sosial, Pasal 1 ayat 1 yang menjamin jaminan sosial merupakan syarat terpenuhinya kebutuhan materil, rohani dan sosial kebutuhan warga negara agar dapat mempunyai penghidupan yang layak dan mempunyai kemampuan mengembangkan diri dalam menjalankan fungsi sosialnya.

Program PKH di Indonesia sudah berjalan selama kurang lebih 15 tahun sejak tahun 2007 silam. Sedangkan negara lain juga sudah menjalankan program ini dengan cukup baik. (Wati, 2020) PKH dalam istilahnya juga dikenal dengan nama CCT atau Conditional Cash Transfer yang artinya Bantuan Tunai Bersyarat. PKH diadakan dengan tujuan memberikan bantuan dan meningkatkan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat kurang mampu untuk dapat dimanfaatkan dengan sebaik baiknya dalam memenuhi kebutuhan harian mereka. Tujuan jangka panjang dari program ini adalah untuk mengentaskan masyarakat dari kemiskinan atau setidaknya mengurangi angka kemiskinan (Virgoreta, 2015). Agar tujuan tersebut dapat tercapai, maka segala persiapan harus dipersiapkan dengan matang agar berjalan efektif dan efisien dan dapat memperkuat kondisi ekonomi masyarakat. Keadaan sosial ekonomi masyarakat perlu menjadi perhatian khusus bagi pemerintah agar tingkat kesejahteraan sosial ekonomi dapat meningkat. Salah satunya diharapkan melalui program PKH ini untuk bisa mencukupi kebutuhan harian masyarakat yang kurang mampu.

Realitanya, banyak masyarakat yang masih mengalami berbagai permasalahan jaminan sosial yang dibuktikan dengan tidak terpenuhinya hak atas kebutuhan dasar dengan baik karena tidak mendapatkan manfaat dari pelayanan sosial negara. Hal ini menyebabkan banyak warga yang masih mengalami hambatan dalam menjalankan fungsi sosialnya sehingga tidak mampu menjalani kehidupan yang layak. Dengan adanya program PKH ini diharapkan tingkat kemiskinan masyarakat dapat dientaskan dan mereka dapat terpenuhi kebutuhannya. Untuk itu, keadaan sosial ekonomi masyarakat perlu menjadi perhatian khusus bagi pemerintah agar tingkat kesejahteraan sosial ekonomi dapat meningkat. Salah satunya diharapkan melalui program PKH ini untuk bisa mencukupi kebutuhan harian masyarakat yang kurang mampu. Program PKH ini didukung oleh Peraturan Kemensos RI No. 1 Tahun 2018 agar dapat berjalan efektif, efisien, akurat, dan sesuai rencana agar dapat menjadi program yang berkelanjutan. Dalam istilah lain PKH merupakan bentuk bantuan materi dari pemerintah untuk membantu masyarakat agar biaya hidup menjadi lebih ringan dan pendapatan dapat meningkat, terutama bagi masyarakat yang kurang mampu. Hal tersebut diatur oleh Peraturan Kemensos

RI No. 1 Tahun 2008. Sedangkan Pasal 2 dalam bab ini mengatur tentang tujuan tujuan dilaksanakannya PKH, yaitu antara lain : (a) Agar kualitas hidup masyarakat kurang mampu dapat ditingkatkan dengan adanya bantuan ekonomi, sosial, kesehatan, dan juga pendidikan. (b) Agar beban hidup masyarakat kurang mampu dapat teringankan dan pendapatan mereka dapat ditingkatkan. (c) Agar hak otonomi masyarakat kurang mampu yang memperoleh bantuan dapat ditingkatkan melalui bantuan pendidikan, sosial ekonomi, dan kesehatan. (d) Agar tingkat kemiskinan dan kesenjangan sosial di Indonesia dapat menurun. (e) Agar bisa menunjukkan manfaat produk dan layanan keuangan formal kepada masyarakat miskin yang menerima bantuan PKH.

Agar dapat terlaksana dengan lancar dan efektif sebagaimana mestinya, PKH hendaknya dilaksanakan oleh pihak pihak yang terlibat dengan kerjasama yang baik. Pemerintah mempunyai peran penting dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat, baik masyarakat pedesaan maupun perkotaan. Namun kenyataannya, pelaksanaan Program Keluarga Harapan belum berjalan lancar dan penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat belum merata. Berdasarkan observasi awal penulis di Desa Tinelo Kecamatan Tilango Kabupaten Gorontalo menunjukkan bahwa peran perangkat desa dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) belum optimal.. Hal ini terjadi karena kurangnya koordinasi yang ditunjukkan dengan koordinasi pemerintah desa dengan dinas sosial masyarakat miskin Kabupaten Gorontalo yang menerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) yang ditujukan kepada mereka yang tergolong kurang mampu.. namun kenyataannya banyak orang yang tertolong, yang tergolong mampu.. Serta pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) belum dilakukan sesuai dengan pentunjuk teknis pelaksanaan, sehingga tidak tepat sasaran.

Validasi data penerima bantuan kurang lengkap, diantaranya validasi data penerima bantuan melalui Program Keluarga Harapan (PKH) dan besaran bantuan yang diterima, banyak masyarakat mengeluhkan dimana masih banyak peserta yang layak menerima atau mendapatkan bantuan melalui program ini tapi tidak terdata sebagai penerima Program Keluarga Harapan (PKH). Berdasarkan data yang ada bahwa masyarakat miskin yang ada di Desa Tinelo Kecamatan Tilango Kabupaten Gorontalo berjumlah 155 kk, sedangkan yang menerima bantuan melalui PKH baru sekitar 80% atau 124 kk. Untuk lebih jelasnya jumlah kk penerima PKH pada tiga tahun terakhir dari tahun 2019, 2020, 2021 dapat dilihat pada tabel berikut ini;

Tabel. Keadaan Jumlah Penerima Bantuan PKH di Desa Tinelo Kec. Tilango

No.	Tahun	Jumlah	Prosentase	Ket
1.	2019	69	55.64	KK
2.	2020	34	27.41	KK
3.	2021	21	16.93	KK
	JUMLAH	124	100	KK

Sumber: Kantor Desa Tinelo Kecamatan Tilango tahun 2022

Tabel di atas mengenai keadaan jumlah penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Tinelo Kecamatan Tilango Kabupaten Gorontalo pada tiga tahun terakhir yaitu dari tahun 2019 sejumlah 69 kk atau 55,64%, tahun 2020 34 kk atau 27,41%, dan tahun 2021 21 kk atau 16,93%. Dari prosentase tersebut di atas menunjukkan bahwa penerima PKH di Desa Tinelo setiap tahunnya mengalami penurunan. Secara keseluruhan penerima bantuan PKH di Desa Tinelo Kecamatan Tilango adalah berjumlah 124 kk. Penyaluran bantuan melalui Program Keluarga Harapan (PKH) belum tepat waktu, hal ini dapat dilihat dari jadwal penyaluran bantuan yang telah ditetapkan melalui rapat bersama antara Dinas Sosial dan pemerintah Desa serta masyarakat penerima bantuan pada pelaksanaannya molor atau tidak sesuai dengan rencana atau waktu yang telah ditetapkan, kondisi ini membingungkan dan menimbulkan persepsi negatif dari masyarakat terhadap peran pemerintah, khususnya pemerintah desa terhadap pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Tinelo Kecamatan Tilango Kabupaten Gorontalo. Belum optimalnya peran pemerintah desa dalam setiap program pembangunan berdampak pada pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Tinelo Kecamatan Tilango Kabupaten Gorontalo tidak efektif dilakukan.

TINJAUAN PUSTAKA

Konsep Peran

Menurut (Azwary, 2013), peran diartikan sebagai perilaku yang ditentukan dan diharapkan oleh seseorang yang menduduki jabatan tertentu. Sedangkan menurut , peran adalah serangkaian perilaku yang timbul dari suatu jabatan. Oleh karena itu, peranan adalah serangkaian kegiatan rutin yang timbul dari suatu jabatan. Manusia sebagai makhluk sosial cenderung hidup berkelompok. Dalam kehidupan berkelompok akan terjadi interaksi antara anggota masyarakat dengan anggota masyarakat lainnya (Tabi'in, 2017). Ketika interaksi diantara keduanya terjadi maka akan terjadi saling ketergantungan dan dengan saling ketergantungan inilah akan muncul peran tersebut.

Konsep Pelaksanaan

Menurut (SIREGAR, n.d.) "Pelaksanaan merujuk pada eksekusi kebijakan pokok yang umumnya termanifestasikan dalam bentuk undang-undang, meskipun kadang-kadang juga dapat berwujud sebagai instruksi atau keputusan yang signifikan from badan eksekutif atau putusan dari lembaga peradilan" yang di kutip oleh (Fathurohman, 2023)

Menurut (Sagala, 2013) "Pelaksanaan mencakup serangkaian tindakan yang mengikuti rencana program atau kebijakan sekolah, melibatkan pengambilan keputusan, langkah-langkah strategis dan operasional, dengan tujuan mewujudkan tujuan program awalnya ditetapkan.

Program PKH

(Kalsum et al., 2019) PKH diadakan dengan tujuan memberikan bantuan dan meningkatkan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat kurang mampu untuk dapat dimanfaatkan dengan sebaik baiknya dalam memenuhi kebutuhan harian mereka. Tujuan jangka panjang dari program ini adalah untuk mengentaskan masyarakat dari kemiskinan atau setidaknya mengurangi angka kemiskinan (Purwanto et al., 2013). Agar tujuan tersebut dapat tercapai, maka segala persiapan harus dipersiapkan dengan matang agar berjalan efektif dan efisien dan dapat memperkuat kondisi ekonomi masyarakat. Keadaan sosial ekonomi masyarakat perlu menjadi perhatian khusus bagi pemerintah agar tingkat kesejahteraan sosial ekonomi dapat meningkat. Salah satunya diharapkan melalui program PKH ini untuk bisa mencukupi kebutuhan harian masyarakat yang kurang mampu (KHARISMA, 2021).

METODOLOGI

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk mengetahui peran pemerintah desa dalam pelaksanaan program keluarga harapan (PKH). Lokasi penelitian berada di Desa Tinelo Kecamatan Tilango Kabupaten Gorontalo. Peneliti memilih lokasi penelitian ini dengan alasan aksesibilitas yang mudah karena dekat dengan lokasi tempat tinggal sehingga transportasi mudah untuk dijangkau untuk menghemat waktu dan biaya agar tidak memberatkan peneliti selama proses pengumpulan data. Selain itu, belum pernah ada yang melakukan penelitian terkait peran pemerintah desa dalam pelaksanaan program keluarga harapan (PKH) di desa tinelo kecamatan tilango Kabupaten Gorontalo. Sumber data yang digunakan terdiri dari data primer yang berasal dari sumber secara langsung dari hasil observasi dan wawancara kepada pemerintah desa yakni: Kepala Desa sebagai informan kunci, Sekretaris Desa, Kaur Kesejahteraan Sosial 1, Petugas Lapangan 1, Masyarakat 3. Informan secara keseluruhan berjumlah 7 orang. Serta data sekunder diperoleh dengan cara mengambil data dari buku, jurnal, serta aturan-aturan dan literature yang berhubungan dengan variabel penelitian.

Teknik yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan data salah satunya adalah dengan metode wawancara. Wawancara merupakan sebuah metode untuk memperoleh informasi atau data dengan mengajukan pertanyaan langsung kepada narasumber yang ada di lapangan (Sudarsono, 2014). Peneliti melakukan sesi tanya jawab dengan informan untuk mengumpulkan data mengenai topik yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas. Selama wawancara, digunakan panduan pertanyaan yang disusun sesuai dengan pentingnya masalah yang diselidiki. Dan dokumentasi dilakukan dengan memotret lokasi, mewawancarai informan, dan foto-foto tersebut mendukung temuan penelitian.

Sedangkan teknik yang digunakan untuk menganalisa data dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif. Menurut (Wijaya, 2018), analisis kualitatif dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu tahap pengolahan unit, klasifikasi termasuk pemeriksaan keabsahan data, diakhiri dengan interpretasi data berupa kata-kata. Sehubungan dengan hal tersebut, penelitian ini akan fokus pada pertanyaan-pertanyaan dan pernyataan-pernyataan tertulis maupun lisan yang berkaitan dengan topik penelitian yang diusulkan.

HASIL PENELITIAN

Kurang validnya data akan berdampak pada Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Tinelo Kecamatan Tilango Kabupaten Gorontalo. Hasil wawancara dengan informan kunci (MHA) selaku Kepala Desa mengatakan bahwa: "Menurut saya bahwa validasi data bagi penerima bantuan Program Keluarga Harapan sudah dilakukan. Saya selaku kepala desa Tinelo sudah berusaha semaksimal mungkin untuk mendapatkan data yang benar-benar obyektif dan dapat dipertanggungjawabkan. Saya berusaha bahwa yang saya masukan sebagai calon penerima bantuan PKH adalah benar-benar masyarakat yang sangat membutuhkan. Walaupun selama ini masih banyak masyarakat yang mengeluh atau mengatakan bahwa apa yang saya lakukan tidak adil (wawancara tgl. 2 Mei 2023).

Pernyataan infroman tersebut di atas menunjukkan bahwa masih ada masyarakat mengeluh dengan apa yang dilakukan oleh kepala desa, karena menurut penilaian sebagian masyarakat bahwa yang diusulkan sebagai calon penerima bantuan PKH rata-rata adalah keluarganya kepala desa, dan orang-orang yang memilihnya pada saat pilkades, padahal masyarakat tersebut sudah dianggap mampu, dan terkesan validasi data yang dilakukan tidak adil. Hal ini terjadi diakibatkan oleh Peran Pemerintah Desa dalam Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Tinelo Kecamatan Tilango Kabupaten Gorontalo belum optimal dilakuan. Hasil wawancara dengan Informan (YL) selaku Petugas Lapangan mengatakan bahwa : "Selama ini bahwa validasi data penerima bantuan melalui Program Keluarga Harapan (PKH) sudah dilakukan, namun selama ini saya melihatnya masih banyak memilik kekurangan atau kurang lengkap, karena masih banyak peserta yang layak menerima atau mendapatkan bantuan melalui program PKH, tapi tidak terdata" . (Wawancara tgl, 4 Mei 2023).

Pernyataan informan tersebut di atas menggambarkan masih ada beberapa masyarakat yang ada di Desa Tinelo Kecamatan Tilango sebagai peserta yang layak menerima atau mendapatkan bantuan melalui Program Keluarga Harapan (PKH), namun tidak terdata sebagai penerima bantuan. Kondisi tersebut terjadi karena peran pemerintah Desa dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Tinelo Kecamatan Tilango Kabupaten Gorontalo belum efektif dilakuan. Peran Pemerintah Desa dalam Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Tinelo Kecamatan Tilango Kabupaten Gorontalo yang dilihat dari aspek validasi data sudah dilakukan tetapi belum efektif dilakukan. Hal ini terjadi karena validasi data yang dilakukan kurang berpihak kepada masyarakat miskin yang sangat membutuhkan bantuan PKH.

Dimana masih adanya masyarakat yang ada di Desa Tinelo sebagai peserta yang layak menerima atau mendapatkan bantuan melalui Program Keluarga Harapan (PKH), namun tidak terdata sebagai calon penerima bantuan PKH. Hal ini terjadi karena peran pemerintah desa belum optimal dilakukan.

Pelaksanaan penyaluran pemberian bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) dilaksanakan sesuai prosedur dan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan sebelumnya. Dengan asumsi bahwa kurangnya efektifnya penyaluran bantuan melalui PKH, mengindikasikan belum optimalnya peran pemerintah desa dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Tinelo Kecamatan Tilango Kabupaten Gorontalo.

Hasil wawancara dengan informan kunci (MHA) selaku Kepala Desa mengatakan bahwa: "Penyaluran bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Tinelo sudah dilakukan, namun kadang-kadang belum tepat waktu dalam pelaksanaannya. Kondisi ini terjadi selain data penerima bantuan PKH mengalami perubahan, ada juga data penerima yang belum diverifikasi, sehingga hal tersebut menimbulkan keterlambatan penyaluran bantuan PKH di Desa Tinelo." (Wawancara tgl 2 Mei 2023). Pernyataan informan di atas menunjukkan bahwa penyaluran bantuan melalui Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Tinelo masih mengalami keterlambatan, hal tersebut disebabkan oleh data penerima bantuan PKH mengalami perubahan, demikian juga ada calon penerima bantuan PKH namun yang bersangkutan belum diverifikasi datanya. Hal ini diakibatkan oleh peran pemerintah desa dalam pelaksanaan program keluarga harapan (PKH) di Desa Tenilo belum optimal dilakukan.

Hasil wawancara dengan Informan (YL) selaku Petugas Lapangan mengatakan bahwa: "Pengamatan saya di Desa Tenilo bahwa dalam penyaluran bantuan PKH seringkali mengalami keterlambatan dibandingkan dengan desa lainnya, hal ini terjadi karena calon penerima bantuan melalui PKH selalu berubah-ubah, namun hal tersebut dapat diselesaikan." (Wawancara tgl, 4 Mei 2023). Pernyataan informan tersebut di atas menunjukkan bahwa dalam program PKH masyarakat sebagai penerima bantuan seringkali mengalami perubahan, sehingga hal tersebut menyebabkan penyaluran bantuan melalui PKH kepada masyarakat penerima bantuan tertunda atau mengalami keterlambatan. Kondisi tersebut terjadi disebabkan oleh kurangnya peran pemerintah desa dalam pelaksanaan program keluarga harapan (PKH) di Desa Tenilo Kecamatan Tilango Kabupaten Gorontalo.

Hasil wawancara dengan Informan (MR) selaku masyarakat mengatakan bahwa: "Pengamatan saya selama ini bahwa penyaluran bantuan melalui Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Tinelo belum tepat waktu, hal ini dapat dilihat dari jadwal penyaluran bantuan yang telah ditetapkan melalui rapat bersama antara Dinas Sosial dan pemerintah Desa serta masyarakat penerima bantuan pada pelaksanaannya molor atau tidak sesuai dengan rencana atau waktu yang telah ditetapkan." (Wawancara tgl, 4 Mei 2023).

Pernyataan informan tersebut di atas menunjukkan bahwa penyaluran bantuan yang telah ditetapkan melalui rapat bersama antara Dinas Sosial dan pemerintah Desa serta masyarakat penerima bantuan di Desa Tinelo pada pelaksanaannya molor atau tidak sesuai dengan rencana atau waktu yang telah ditetapkan. Kondisi ini membingungkan dan menimbulkan persepsi negatif dari masyarakat terhadap peran pemerintah, khususnya pemerintah desa terhadap pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Tinelo Kecamatan Tilango Kabupaten Gorontalo. Hasil wawancara dengan informan (FP) selaku masyarakat mengatakan bahwa: "Pengamatan saya selama ini selaku masyarakat desa, bahwa penyaluran bantuan melalui Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Tinelo belum sesuai harapan masyarakat desa, karena tidak tepat waktu atau terlambat dan terkesan masih pilih kasih dalam pemberian bantuan, sehingga kondisi ini menimbulkan keresahan di tengah-tengah masyarakat desa." (wawancara tgl 4 Mei 2023).

Pernyataan informan tersebut di atas menggambarkan bahwa penyaluran bantuan kepada masyarakat penerima bantuan melalui PKH di Desa Tinelo Kecamatan Tilango belum sesuai harapan masyarakat desa. Sehingga hal tersebut menimbulkan persepsi negatif masyarakat terhadap aparat desa. Untuk itu, agar penyaluran bantuan melalui PKH lebih efektif dan sesuai dengan harapan masyarakat desa, maka sangat penting adanya peran pemerintah dalam hal ini Dinas Sosial Kabupaten Gorontalo dan lebih khusus pemerintah desa Tinelo Kecamatan Tilango Kabupaten Gorontalo.

Berdasarkan pernyataan atau hasil wawancara dengan beberapa informan dan dari pengamatan peneliti, menunjukkan bahwa Peran Pemerintah Desa dalam Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Tinelo Kecamatan Tilango Kabupaten Gorontalo yang dilihat dari aspek penyaluran bantuan belum efektif dilakukan. Hal ini terjadi karena penyaluran bantuan melalui Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Tinelo belum tepat waktu, hal ini dapat dilihat dari jadwal penyaluran bantuan yang telah ditetapkan melalui rapat bersama antara Dinas Sosial dan pemerintah Desa serta masyarakat penerima bantuan pada pelaksanaannya molor atau tidak sesuai dengan rencana atau waktu yang telah ditetapkan. Kondisi ini membingungkan dan menimbulkan persepsi negatif dari masyarakat terhadap peran pemerintah, khususnya pemerintah desa terhadap pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Tinelo Kecamatan Tilango Kabupaten Gorontalo

PEMBAHASAN

1. Koordinasi yang dimaksud dalam penelitian ini yakni komunikasi dan singronisasi yang dilakukan oleh pemerintah desa dengan pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Sosial Kabupaten dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Tinelo Kecamatan Tilango Kabupaten Gorontalo. Dengan asumsi bahwa kurang optimalnya koordinasi yang dilakukan pemerintah desa, mengindikasikan kurang berhasilnya Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Tinelo Kecamatan Tilango Kabupaten Gorontalo. Berdasarkan pernyataan atau

hasil wawancara dengan beberapa informan dan dari pengamatan peneliti, menunjukkan bahwa Peran Pemerintah Desa dalam Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Tinelo Kecamatan Tilango Kabupaten Gorontalo yang dilihat dari aspek koordinasi belum efektif dilakukan. Hal ini terjadi karena koordinasi dalam pelaksanaan program keluarga harapan (PKH) masih kurang dilakukan oleh aparatur desa. Kondisi ini menyebabkan terjadinya perbedaan penentuan calon penerima bantuan melalui PKH, dimana yang seharusnya bagi mereka masyarakat yang tergolong tidak mampu, namun fakta yang ada banyak penerima bantuan masyarakat yang sudah kategorikan mampu tetapi menerima bantuan PKH di Desa Tinelo Kecamatan Tilango Kabupaten Gorontalo.

2. Validasi Data yang dimaksud dalam penelitian ini yakni bahwa informasi data Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Tinelo Kecamatan Tilango Kabupaten Gorontalo benar-benar data yang akurat dan dapat dipertanggungjawab kebenarannya. Dengan asumsi bahwa kurang validnya data akan berdampak pada Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Tinelo Kecamatan Tilango Kabupaten Gorontalo. Berdasarkan pernyataan atau hasil wawancara dengan beberapa informan dan dari pengamatan peneliti, menunjukkan bahwa Peran Pemerintah Desa dalam Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Tinelo Kecamatan Tilango Kabupaten Gorontalo yang dilihat dari aspek validasi data sudah dilakukan tetapi belum efektif dilakukan. Hal ini terjadi karena validasi data yang dilakukan kurang berpihak kepada masyarakat miskin yang sangat membutuhkan bantuan PKH. Dimana masih adanya masyarakat yang ada di Desa Tinelo sebagai peserta yang layak menerima atau mendapatkan bantuan melalui Program Keluarga Harapan (PKH), namun tidak terdata sebagai calon penerima bantuan PKH. Hal ini terjadi karena peran pemerintah desa belum optimal dilakukan.
3. Penyaluran yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu pelaksanaan penyaluran pemberian bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) dilaksanakan sesuai prosedur dan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan sebelumnya. Dengan asumsi bahwa kurangnya efektifnya penyaluran bantuan melalui PKH, mengindikasikan belum optimalnya peran pemerintah desa dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Tinelo Kecamatan Tilango Kabupaten Gorontalo. Berdasarkan pernyataan atau hasil wawancara dengan beberapa informan dan dari pengamatan peneliti, menunjukkan bahwa Peran Pemerintah Desa dalam Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Tinelo Kecamatan Tilango Kabupaten Gorontalo yang dilihat dari aspek penyaluran bantuan belum efektif dilakukan. Hal ini terjadi karena

penyaluran bantuan melalui Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Tinelo belum tepat waktu, hal ini dapat dilihat dari jadwal penyaluran bantuan yang telah ditetapkan melalui rapat bersama antara Dinas Sosial dan pemerintah Desa serta masyarakat penerima bantuan pada pelaksanaannya molor atau tidak sesuai dengan rencana atau waktu yang telah ditetapkan. Kondisi ini membingungkan dan menimbulkan persepsi negatif dari masyarakat terhadap peran pemerintah, khususnya pemerintah desa terhadap pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Tinelo Kecamatan Tilango Kabupaten Gorontalo.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan sebelumnya, peneliti mengambil beberapa simpulan sebagai berikut. Dari aspek koordinasi belum efektif dilakukan, karena koordinasi dan sinkronisasi dalam pelaksanaan program keluarga harapan (PKH) masih kurang dilakukan oleh aparatur desa. Dilihat dari aspek Validasi data belum efektif dilakukan, karena validasi data yang dilakukan kurang berpihak kepada masyarakat miskin yang sangat membutuhkan bantuan PKH. Dilihat dari aspek penyaluran belum efektif, karena penyaluran bantuan melalui Program Keluarga Harapan (PKH) belum tepat waktu, jjadwal penyaluran bantuan yang telah ditetapkan melalui rapat bersama antara Dinas Sosial dan pemerintah Desa serta masyarakat penerima bantuan pada pelaksanaannya molor atau tidak sesuai dengan rencana atau waktu yang telah ditetapkan. Secara keseluruhan penelitian mengenai Peran Pemerintah Desa dalam Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) yang dilihat dari aspek koordinasi, validitas data, dan penyaluran bantuan belum efektif dilakukan di Desa Tinelo Kecamatan Tilango Kabupaten Gorontalo

PENELITIAN LANJUTAN

Setiap penelitian memiliki keterbatasan data dan waktu penelitian, maka peneliti selanjutnya disarankan agar meningkatkan ketelitian, baik dalam segi kelengkapan data maupun proses pencarian informasi. Serta kesiapan waktu dan mental saat melakukan penelitian.

UCAPAN TERIMA KASIH

Peneliti menyadari bahwa penelitian ini masih jauh dari sempurna. Karena itu, kritik dan saran akan senantiasa penulis terima dengan senang hati. Dengan segala keterbatasan, peneliti menyadari pula bahwa laporan penelitian ini takkan terwujud tanpa bantuan, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak. Untuk itu, dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan ucapan terima kasih.

REFERENSI

- Azworthy, B. (2013). Peran Paramedis dalam Meningkatkan Pelayanan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Pembantu Kampung Kasai Kecamatan Pulau Derawan Kabupaten Berau. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 1(1), 385-399.
- Fathurohman, D. T. (2023). REKONSTRUKSI REGULASI KEWENANGAN KOMISI YUDISIAL DALAM MENJAGA KELUHURAN MARWAH DAN MARTABAT HAKIM YANG BERDASARKAN NILAI KEADILAN. UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG.
- Kalsum, U., Umiati, N., & Hayat, H. (2019). IMPLEMENTASI PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT (Studi Kebijakan UU No. 10 Tahun 2017 Tentang Program Keluarga Harapan pada Desa Tamanasri Kecamatan Ampelgading Kabupaten Malang). *Respon Publik*, 13(6), 70-76.
- KHARISMA, E. K. A. (2021). Peran Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Mengentaskan Kemiskinan di Nagari Balimbing.
- Purwanto, S. A., Sumartono, S., & Makmur, M. (2013). Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Memutus Rantai Kemiskinan (Kajian di Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto). *Wacana Journal of Social and Humanity Studies*, 16(2), 79-96.
- Sagala, S. (2013). Menyusun Rencana Pengembangan Sekolah Dengan Prinsip Partisipatif Transparan dan Akuntabel. -.
- SIREGAR, N. T. L. (n.d.). REFORMULASI SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA DI HADAPAN ANAK DENGAN KONTEKS LEGAL REFORM TINDAK PIDANA DI INDONESIA. *Jurnal Hukum Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Untan (Jurnal Mahasiswa S1 Fakultas Hukum) Universitas Tanjungpura*, 5(2).
- Tabi'in, A. (2017). Menumbuhkan sikap peduli pada anak melalui interaksi kegiatan sosial. *IJTIMAIYA: Journal of Social Science Teaching*, 1(1).
- Virgoreta, D. A. (2015). Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Pada Desa Beji Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban). Brawijaya University.
- Wati, R. (2020). Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Penanggulangan Kemiskinan (Studi Kasus: Desa Muara Batu-batu Kecamatan Rundeng Kota Subulussalam). UIN Ar-Raniry.